

Analisis Implementasi Kebijakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Dalam Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Intan Jaya

Hermin Sama^{1*}, Kristian Hoegh Pride Lambe², Yunus Sirante³

^{1,2,3}Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

herminsama@gmail.com^{1*}

*Penulis korespondensi

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Intan Jaya dalam mendukung pembangunan daerah. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Diskominfo SP telah berkontribusi pada peningkatan layanan informasi publik, penguatan komunikasi pemerintah, serta penyediaan data statistik untuk perencanaan pembangunan. Namun demikian, berbagai hambatan masih dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur TIK yang belum merata, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan meliputi dukungan kepala daerah, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, serta adanya inisiatif digitalisasi layanan publik. Penelitian ini menekankan perlunya strategi penguatan kapasitas SDM, peningkatan infrastruktur TIK, serta sinergi lintas sektor dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi bagi penyusunan kebijakan publik di daerah tertinggal, khususnya dalam konteks transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis data.

Kata kunci: implementasi kebijakan, Diskominfo, pembangunan daerah, Intan Jaya, transformasi digital

Abstract: This study analyzes the policy implementation of the Department of Communication, Informatics, Statistics, and Encryption (Diskominfo SP) in supporting regional development in Intan Jaya Regency. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that Diskominfo SP's policies have contributed to improving public information services, strengthening government communication, and providing statistical data for development planning. Nevertheless, several challenges remain, including limited human resources, uneven ICT infrastructure, difficult geographical conditions, and low levels of digital literacy among the community. Supporting factors for successful implementation include strong leadership commitment, inter-agency coordination, and digitalization initiatives in public services. The study emphasizes the importance of enhancing human resource capacity, expanding ICT infrastructure, and fostering cross-sector collaboration to ensure inclusive and sustainable regional development. These findings provide practical implications for public policy formulation in disadvantaged regions, particularly in the context of digital transformation and data-driven governance.

Keywords: policy implementation, Diskominfo, regional development, Intan Jaya, digital transformation

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Transformasi digital telah menjadi agenda penting dalam pembangunan daerah di Indonesia, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat pemerataan pembangunan. Namun, kesenjangan digital masih cukup tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet di daerah pedesaan hanya mencapai 35,90%, jauh tertinggal dibandingkan 64,10% di perkotaan (Badan Pusat Statistik [BPS], 2023). Bahkan, di beberapa provinsi seperti Sulawesi Barat, penetrasi internet tercatat hanya 0,44% (Equitas FEB UGM, 2024).

Pemerintah Indonesia telah membangun infrastruktur digital melalui Proyek Palapa Ring untuk menjangkau wilayah Timur, termasuk Papua, dengan jaringan serat optik sepanjang ribuan kilometer. Namun, pemanfaatannya belum optimal akibat kendala geografis, keterbatasan listrik, serta minimnya kualitas sumber daya manusia (Anderson & Hearn, 2021; APNIC Foundation, 2023). Kondisi ini turut memperburuk kesenjangan pembangunan, khususnya di kabupaten baru seperti Intan Jaya yang masih menghadapi keterbatasan akses teknologi, rendahnya literasi digital, serta lemahnya integrasi digital dalam tata kelola pemerintahan (Yusuf & Setiawan, 2025).

Penelitian-penelitian terbaru menegaskan bahwa literasi digital masyarakat Indonesia, khususnya di daerah rural, masih rendah sehingga menghambat pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari (Rifki & Yuliana, 2023). Hambatan lainnya adalah infrastruktur TIK yang belum memadai, kurangnya SDM profesional, serta kebijakan yang belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan daerah (Mahendra & Putra, 2021; Sutrisno, 2023). Di sisi lain, pendekatan digital empowerment berbasis komunitas terbukti dapat meningkatkan partisipasi sosial dan ekonomi masyarakat lokal (Lindner & Coombs, 2024; Tjahjono & Widyanto, 2024).

Tabel berikut merangkum data dan fakta yang mendukung fenomena tersebut:

Tabel 1. Data/Fakta Pendukung Fenomena

Faktor	Data / Fakta
Internet rural vs urban	Rural: 35,90%; Urban: 64,10% (BPS, 2023)
Penetrasi internet di Sulawesi Barat	Hanya 0,44% (Equitas FEB UGM, 2024)

Faktor	Data / Fakta
Infrastruktur Palapa Ring	Kabel serat optik menjangkau Papua (Anderson & Hearn, 2021)
Hambatan digital rural	Infrastruktur minim, literasi rendah, integrasi terbatas (APNIC Foundation, 2023; Rifki & Yuliana, 2023)
Digital empowerment komunitas	Meningkatkan partisipasi & ekonomi lokal (Lindner & Coombs, 2024; Tjahjono & Widyanto, 2024)

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber (2025)

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan karena kebijakan Diskominfo SP Kabupaten Intan Jaya berada pada posisi strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui penguatan layanan informasi publik, pengelolaan data statistik, dan pengembangan infrastruktur TIK. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, tantangan geografis, serta kesiapan masyarakat dalam beradaptasi dengan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan strategi kebijakan digital yang inklusif dan adaptif untuk wilayah tertinggal di Indonesia, khususnya Papua.

TINJAUAN LITERATUR

Kebijakan Publik dan Implementasinya

Kebijakan publik dipahami sebagai rangkaian keputusan dan tindakan pemerintah untuk menjawab masalah publik lintas-sektor (ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, teknologi), dengan tahapan perumusan–implementasi–evaluasi–penyesuaian dan sangat dipengaruhi kapasitas institusi, kepemimpinan, partisipasi, serta ketersediaan sumber daya (Abidin, 2023; Tamin, 2024).

Perubahan sosial dan institusional turut membentuk hasil kebijakan, termasuk dinamika aktor level pelaksana (street-level bureaucracy) yang menentukan wajah implementasi di lapangan (Boudon, 2021; Lipsky, 2021).

Diskominfo, Tata Kelola Data, dan Pembangunan Daerah

Dalam konteks otonomi daerah, Diskominfo berperan strategis sebagai penggerak transformasi digital, keterbukaan informasi, penyediaan data statistik, serta pengamanan informasi (persandian) guna mempercepat pembangunan dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan berbasis data. Ringkasan peran ini

ditegaskan pada pendahuluan dan ruang lingkup penelitian tesis untuk Kabupaten Intan Jaya.

Literatur kebijakan TIK dan statistik menempatkan informasi/komunikasi serta data yang akurat sebagai prasyarat perencanaan berbasis bukti dan tata kelola yang efisien (Miller & Wang, 2022; Harahap, 2024).

TIK untuk Layanan Publik dan Perencanaan Berbasis Bukti

Pemanfaatan TIK yang tepat meningkatkan transparansi, efisiensi administrasi, partisipasi publik, dan akurasi perencanaan—namun implementasinya sering terhambat isu infrastruktur dan literasi digital (Agustina & Sari, 2022; Mahendra & Putra, 2021).

Penguatan fungsi statistik—mulai akurasi data, evaluasi program, hingga pengurangan ketimpangan—mendukung kebijakan yang lebih tajam (Pardede & Suryani, 2023; Mulyani & Wulandari, 2024; Wibowo & Rahayu, 2024).

Dalam perspektif kebijakan digital Indonesia, transformasi menuntut orkestrasi lintas-aktor dan kebijakan adaptif terhadap konteks lokal (Miller & Tan, 2022; Wibowo, 2022; Sutrisno, 2025; Yusuf & Setiawan, 2025).

Faktor Penentu dan Hambatan Implementasi

Temuan lapangan dari penelitian ini merangkum faktor penentu: dukungan pimpinan/kepala daerah, kompetensi SDM, kecukupan anggaran, ketersediaan infrastruktur TIK, serta koordinasi antar-OPD/pusat; sebaliknya, kegagalan dipicu ketika satu atau lebih faktor ini absen.

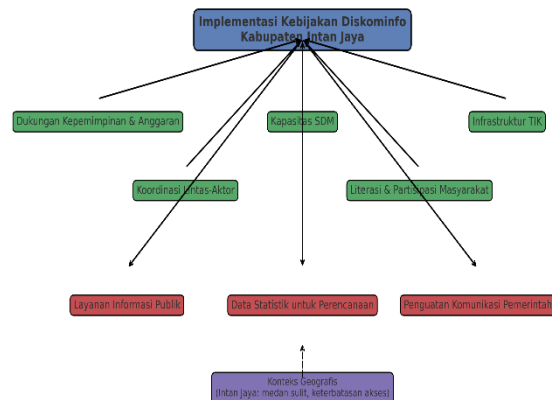
Hambatan khas daerah tertinggal/terpencil mencakup keterbatasan jaringan, kondisi geografis sulit, literasi digital masyarakat yang rendah, serta kendala perangkat/biaya (Rifki & Yuliana, 2023; kutipan wawancara Diskominfo Intan Jaya).

Solusi literatur menekankan peningkatan infrastruktur, pelatihan SDM, dan kolaborasi pemerintah–swasta serta pemberdayaan digital berbasis komunitas (Tjahjono & Widyanto, 2024; Lindner & Coombs, 2024).

Kerangka Konseptual Penelitian

Bertolak dari literatur dan konteks lokal Intan Jaya, implementasi kebijakan Diskominfo dipandang sebagai fungsi dari: (a) dukungan kepemimpinan/anggaran; (b) kapasitas SDM; (c) infrastruktur TIK; (d) koordinasi lintas-aktor; (e)

literasi/partisipasi masyarakat. Hasil implementasi diukur melalui peningkatan layanan informasi publik, ketersediaan data statistik untuk perencanaan, serta penguatan komunikasi pemerintah—dengan konteks geografis sebagai moderator penting.



Sumber: Penulis (2025)

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Desain ini dipilih karena bertujuan memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Intan Jaya dalam mendukung pembangunan daerah. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena yang kompleks, menggali makna, serta menafsirkan dinamika sosial dan kelembagaan yang melatarbelakangi implementasi kebijakan (Creswell & Poth, 2018; Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

Populasi penelitian adalah seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam implementasi kebijakan Diskominfo, baik internal maupun eksternal. Namun, karena penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi melainkan kedalaman informasi, maka yang menjadi fokus adalah informan kunci yang dipilih secara purposive. Teknik purposive sampling dipandang tepat karena memungkinkan peneliti menentukan informan berdasarkan relevansi pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam fenomena penelitian (Etikan & Bala, 2017). Informan terdiri dari pejabat struktural di Diskominfo SP Kabupaten Intan Jaya, pejabat pemerintah daerah terkait, serta

perwakilan masyarakat yang merasakan langsung dampak kebijakan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, dengan fokus pada Dinas Kominfo SP sebagai instansi utama pelaksana kebijakan. Penelitian dilaksanakan selama satu bulan, dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan keterbatasan akses wilayah. Pemilihan lokasi ini dilandasi oleh pertimbangan kontekstual bahwa Intan Jaya merupakan daerah yang sedang berupaya mengakselerasi pembangunan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan statistik, namun menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur yang signifikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Wawancara digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam dari para informan kunci, sedangkan observasi dilakukan untuk melihat langsung implementasi kebijakan di lapangan. Studi dokumen meliputi analisis kebijakan, laporan kegiatan, serta data statistik resmi yang terkait. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, sebagaimana disarankan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan keabsahan temuan (Patton, 2015; Moleong, 2017).

Data dianalisis dengan teknik analisis kualitatif model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2019). Proses analisis dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema utama, pola hubungan, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Diskominfo. Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menghasilkan gambaran komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan digital di daerah tertinggal serta kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan lima informan kunci yang dipilih secara purposive karena memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan Dinas Kominfo SP Kabupaten Intan Jaya. Tabel berikut menggambarkan profil informan penelitian:

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian

Informan	Nama	Jabatan	Latar Belakang Pendidikan	Bidang Tugas Utama
1	Yunus Bagubau, S.Sos	Kepala Seksi Neraca Produksi, Sosial, dan Distribusi	S1 Ilmu Sosial	Penyusunan data statistik sektoral dan neraca produksi untuk perencanaan pembangunan
2	Olivia Zonggonau, S.IP	Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi	S1 Ilmu Pemerintahan	Pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan layanan pos daerah
3	Adi Tidar Manik, S.IP	Kepala Seksi Komunikasi	S1 Ilmu Pemerintahan	Pengelolaan komunikasi publik dan media informasi pemerintah
4	Ruf Weya, S.IP	Kepala Seksi Layanan Informasi	S1 Ilmu Pemerintahan	Pelayanan informasi publik dan pengelolaan konten media pemerintah
5	Darius Salmon Jitmau, S.IP	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S1 Ilmu Pemerintahan	Administrasi umum, manajemen SDM, dan dukungan operasional

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Implementasi Kebijakan Diskominfo dalam Pembangunan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Diskominfo SP di Kabupaten Intan Jaya telah memberikan kontribusi dalam tiga aspek utama: layanan informasi publik, penguatan infrastruktur telekomunikasi, dan penyediaan data statistik untuk perencanaan pembangunan. Informan 1 menegaskan bahwa pengumpulan dan pemutakhiran data sektoral menjadi dasar penting dalam mendukung perencanaan daerah:

“Kebijakan utama kami meliputi pengumpulan dan pemutakhiran data neraca produksi, sosial, dan distribusi. Data ini menjadi dasar perencanaan pembangunan, meski terkendala kondisi

geografis dan keterbatasan SDM.” (Yunus Bagubau, Kepala Seksi Neraca Produksi).

Selain itu, penguatan infrastruktur telekomunikasi menjadi fokus utama untuk memperluas akses masyarakat. Informan 2 menyatakan:

“Kami mengembangkan kebijakan teknis terkait pemerataan akses informasi, terutama dengan pembangunan jaringan telekomunikasi. Kendala terbesar tetap pada jaringan yang belum menjangkau wilayah terpencil.” (Olivia Zonggonau, Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi).

Pada aspek komunikasi publik, kebijakan Diskominfo diarahkan untuk memperkuat keterbukaan informasi dan transparansi pemerintah daerah. Informan 3 menegaskan:

“Kami memanfaatkan media digital dan komunikasi online untuk memperluas jangkauan informasi. Hal ini meningkatkan keterbukaan informasi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.” (Adi Tidar Manik, Kepala Seksi Komunikasi).

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Keberhasilan implementasi kebijakan Diskominfo dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, yaitu: dukungan kepala daerah, koordinasi antar-OPD, serta adanya inisiatif digitalisasi layanan publik. Informan 4 menyatakan:

“Dukungan pimpinan daerah sangat berpengaruh, baik dalam alokasi anggaran maupun arah strategis pelayanan informasi publik. Hal ini memotivasi kami untuk meningkatkan layanan.” (Ruf Weya, Kepala Seksi Layanan Informasi).

Namun demikian, implementasi masih menghadapi sejumlah hambatan serius. Informan 5 menekankan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran:

“SDM yang profesional masih terbatas, sementara infrastruktur juga belum memadai. Hal ini sering menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan, meskipun dukungan pimpinan sudah ada.” (Darius Salmon Jitmau, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian).

Hambatan lain meliputi kondisi geografis Intan Jaya yang sulit dijangkau, keterbatasan

jaringan internet (masih dominan 2G), serta rendahnya literasi digital masyarakat. Tantangan ini membuat sebagian besar program digitalisasi tidak berjalan optimal di semua distrik.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pertama, implementasi kebijakan Diskominfo SP memang sudah diarahkan pada peningkatan layanan publik, penguatan infrastruktur telekomunikasi, dan pengelolaan data statistik. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada faktor pendukung internal dan eksternal. Kedua, faktor keberhasilan meliputi dukungan kepemimpinan, koordinasi antar-OPD, serta komitmen dalam digitalisasi layanan publik, yang sejalan dengan temuan Creswell dan Poth (2018) bahwa implementasi kebijakan efektif memerlukan komitmen politik dan koordinasi yang baik. Ketiga, hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan SDM, infrastruktur TIK yang belum memadai, dan rendahnya literasi digital masyarakat, sebagaimana juga ditegaskan oleh Yusuf dan Setiawan (2025) terkait tantangan transformasi digital di daerah tertinggal.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Diskominfo dalam mendukung pembangunan daerah Intan Jaya sangat ditentukan oleh sinergi antara faktor kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Upaya strategis diperlukan untuk memperkuat kapasitas SDM, memperluas jaringan TIK, serta meningkatkan literasi digital masyarakat agar kebijakan dapat memberikan dampak pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3. Ringkasan Temuan Penelitian

Pertanyaan Penelitian	Temuan Utama	Dukungan Data / Wawancara
Bagaimana implementasi kebijakan Diskominfo SP dalam mendukung pembangunan daerah?	Implementasi sudah berjalan melalui: (a) layanan informasi publik, (b) penguatan infrastruktur TIK, (c) penyediaan data statistik.	<i>“Kami memanfaatkan media digital dan komunikasi online untuk memperluas jangkauan informasi...”</i> (Informan 3, Komunikasi).
Faktor apa saja yang mendukung implementasi	Dukungan kepala daerah, koordinasi antar-OPD, dan inisiatif digitalisasi layanan publik.	<i>“Dukungan pimpinan daerah sangat berpengaruh, baik dalam alokasi anggaran maupun</i>

Pertanyaan Penelitian	Temuan Utama	Dukungan Data / Wawancara
kebijakan Diskominfo SP?		<i>arah strategis...</i> (Informan 4, Layanan Informasi).
Hambatan apa yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Diskominfo SP di Intan Jaya?	Hambatan meliputi keterbatasan SDM, keterbatasan infrastruktur TIK (jaringan masih minim), kondisi geografis sulit, serta rendahnya literasi digital masyarakat.	<i>“SDM yang profesional masih terbatas, sementara infrastruktur juga belum memadai...”</i> (Informan 5, Subbag Umum & Kepegawaian).
Apa dampak implementasi kebijakan Diskominfo terhadap pembangunan daerah?	Terjadi peningkatan keterbukaan informasi publik, akses komunikasi pemerintah, dan ketersediaan data statistik untuk perencanaan pembangunan.	<i>“Kebijakan utama kami meliputi pengumpulan dan pemutakhiran data neraca produksi... Data ini menjadi dasar perencanaan pembangunan.”</i> (Informan 1, Statistik).

Sumber: Hasil wawancara (2025)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Intan Jaya telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, meskipun masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Implementasi kebijakan diwujudkan melalui tiga aspek utama, yaitu: (1) peningkatan layanan informasi publik yang lebih transparan dan partisipatif; (2) penguatan infrastruktur telekomunikasi sebagai prasyarat perluasan akses informasi; dan (3) penyediaan data statistik yang menjadi basis perencanaan pembangunan berbasis bukti.

Faktor pendukung implementasi meliputi dukungan kepala daerah, koordinasi antar-OPD, serta inisiatif digitalisasi layanan publik. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan, yakni keterbatasan sumber daya manusia profesional, keterbatasan infrastruktur TIK, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Hambatan tersebut berimplikasi pada belum optimalnya efektivitas kebijakan, khususnya di wilayah terpencil.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian implementasi kebijakan publik yang menekankan peran kapasitas kelembagaan,

sumber daya, dan partisipasi masyarakat sebagai determinan keberhasilan kebijakan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar perumusan strategi kebijakan digital di daerah tertinggal agar lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Diskominfo SP melalui program pendidikan, pelatihan, serta peningkatan profesionalisme aparatur. Kedua, perlu ada peningkatan investasi pada infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, khususnya jaringan internet, yang merata hingga ke distrik-distrik terpencil. Ketiga, program literasi digital masyarakat perlu diperluas agar warga mampu memanfaatkan teknologi secara produktif dan berdaya guna. Keempat, koordinasi lintas sektor antara Diskominfo dengan OPD lain, pemerintah pusat, serta mitra swasta perlu ditingkatkan untuk memperkuat sinergi kebijakan.

Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi kebijakan Diskominfo SP di Kabupaten Intan Jaya diharapkan dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis data di wilayah yang masih tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2023). *Kebijakan publik: Teori dan praktik implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustina, R., & Sari, D. (2022). Digital governance in rural Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Public Administration Studies*, 6(2), 145–157. <https://doi.org/10.31002/jpas.v6i2.214>
- Anderson, J., & Hearn, A. (2021). Digital infrastructure and social inclusion in Eastern Indonesia. *Information Technology for Development*, 27(4), 675–692. <https://doi.org/10.1080/02681102.2020.1865852>
- APNIC Foundation. (2023). *Local community-based internet infrastructure development and utilisation in rural Indonesia: Technical report*. Retrieved from <https://apnic.foundation>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik*

- telekomunikasi Indonesia* 2023. Jakarta: BPS.
- Christianingrum, C., Baharuddin, B., & Malissa, M. (2025). Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara tanpa Tunjangan Kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa. *J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 12–21. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/980>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Etikan, I., & Bala, K. (2017). Sampling and sampling methods. *Biostatistics International Journal*, 5(6), 215–217. <https://doi.org/10.15406/bbij.2017.05.00149>
- Harahap, R. (2024). E-government and data-driven governance in Indonesia: A case study. *Journal of Policy and Governance*, 12(1), 34–49. <https://doi.org/10.22219/jpg.v12i1.8274>
- Halik, J. B., Lintang, J., & Patandean, E. H. B. (2024). The role of employee productivity through digitalization in increasing the performance of culinary SMEs. *Brazilian Journal of Development*, 10(2). <https://doi.org/10.34117/bjdv10n2-047>
- Halik, J. B., Rantererung, C. L., Sutomo, D. A., Rasinan, D., Daud, M., & Todingbua, M. A. (2024). *Era Disruptif* (J. B. Halik (ed.); 1st ed.). CV. Adanu Abimata. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=kKUDEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA179&ots=GVM0GTeahE&sig=ixF8ruUsRR4KmAtdE_GYwrlvO4k&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Lambe, K. H. P. (2024). Unlocking Gen-Z employee potential: the role of strategic leadership and organizational culture Desbloqueando o potencial dos funcionários da geração Z: o papel da liderança estratégica e da cultura organizacional Cómo liberar el potencial de los emplea. *Brazilian Journal of Development*, 10(11), 1–21. <https://doi.org/10.34117/bjdv10n11-033>
- Lambe, K. H. P., Palondongan, E., Ma'na, P., & Tandi, A. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. *Al-Buhuts*, 20(1), 138–147. <https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4711>
- Lindner, S., & Coombs, T. (2024). Community-based digital empowerment for social inclusion. *International Journal of Rural Studies*, 30(1), 11–25. <https://doi.org/10.1080/1354571X.2023.1998821>
- Lipsky, M. (2021). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services* (30th anniversary ed.). New York, NY: Russell Sage Foundation.
- Mahendra, Y., & Putra, A. (2021). Digital transformation in Indonesian local government: Barriers and strategies. *Public Policy and Administration Research*, 11(4), 59–70. <https://doi.org/10.7176/PPAR/11-4-07>
- Mangallo, E., Baharuddin, & Lambe, K. H. P. (2025). EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(1), 108–115. <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/865>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Miller, T., & Tan, C. (2022). Policy innovation in digital governance: Lessons from Southeast Asia. *Policy Studies*, 43(6), 1021–1039. <https://doi.org/10.1080/01442872.2021.1971132>
- Mulyani, S., & Wulandari, D. (2024). Statistical data quality and development planning in Indonesian districts. *Journal of Development Planning*, 9(2), 77–91. <https://doi.org/10.22219/jdp.v9i2.9127>
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.254>
- Panggalo, A., Lambe, K. H. P., & Halik, J. B. (2025). Analisis Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo : Peran Sistem LPSE Dalam Meningkatkan Proses Pengadaan.

- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 70–78.
<https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jmebi/article/view/992/824>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Pardede, A., & Suryani, R. (2023). Strengthening local government through evidence-based policy making. *Indonesian Journal of Governance and Policy*, 5(1), 23–36.
<https://doi.org/10.25077/ijgp.5.1.23-36.2023>
- Rifki, M., & Yuliana, D. (2023). Digital literacy in Indonesian rural communities: Challenges and initiatives. *Jurnal Komunikasi dan Informasi*, 13(2), 187–199.
<https://doi.org/10.20885/jki.vol13.iss2.art7>
- Reoreng, P. P., Halik, J. B., Halik, M. Y., & Irdawati. (2024). Systematic Literature Review: Kondisi Makroekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 dan Prospek di Masa Mendatang. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 56–67.
<https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.306>
- Rumopa, M., Baharuddin, Halik, J. B., & Lambe, K. H. P. (2025). Improving Ship Crew Job Satisfaction: The Role of Work Environment and Career Development. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 1304–1315.
<https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.665>
- Susanti, R., Lambe, K. H. P., & Gunadi, H. (2024). Pengaruh Motivasi, Disiplin dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Yayasan Kristen Wamena Kabupaten Jayawijaya. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 2(2), 47–55.
<https://doi.org/10.63416/mrb.v2i2.301>
- Sutrisno, B. (2023). Barriers to ICT implementation in Papua: Infrastructure and human resource perspectives. *Papua Policy Review*, 2(1), 55–68.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/jk83t>
- Tamin, F. (2024). *Analisis kebijakan publik di era digital*. Bandung: Alfabeta.
- Tjahjono, H. K., & Widyanto, A. (2024). Digital inclusion through community empowerment: A study in rural Indonesia. *Social Sciences and Humanities Research Bulletin*, 8(1), 44–59.
<https://doi.org/10.31002/sshrb.v8i1.26>
- Wibowo, S. (2022). Digital government readiness in Indonesian provinces. *Governance and Society Review*, 10(3), 221–237.
<https://doi.org/10.1080/19460171.2022.1987741>
- Wibowo, S., & Rahayu, F. (2024). Statistical innovation for sustainable local development. *Journal of Applied Statistics and Policy*, 14(2), 134–149.
<https://doi.org/10.22219/jasp.v14i2.8573>
- Yusuf, M., & Setiawan, I. (2025). Challenges of digital transformation in Indonesia's remote regions. *Indonesian Journal of Digital Policy*, 3(1), 1–15.
<https://doi.org/10.22219/ijdp.v3i1.9325>